



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan
issn 2354-6174 eissn 2476-9649
Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah
Volume 9 Nomor 2 2021, (241-264)
DOI: 10.21043/fikrah.v8i1.11603

Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia

Paelani Setia

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
setiapaelani66@gmail.com

M. Taufiq Rahman

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
fikrakoe@uinsgd.ac.id

Abstract

This paper aims to explain the role of radical Islamic organizations in the era of globalization. The case study taken in this research is Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). As a transnational organization, Hizb ut-Tahrir grew and crossed national boundaries, including arriving in Indonesia and playing an essential role in shaping public opinion in Indonesia. This study uses qualitative research methods to collect data through online observation, which is described by content analysis. The findings of this study are Hizb ut-Tahrir Indonesia is part of the players of globalization. This is evidenced by the organization's involvement in 50 countries and five continents globally supported by their global media. In Indonesia, although the Government disbanded it in 2017, Hizb ut-Tahrir's activities are still strengthened and maintained through globalization instruments such as the internet. HTI then carried out virtual guerrilla activities to keep the idea of a caliphate grounded.

Keywords: media networks, political revolution, political Islam, radicalism

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran organisasi Islam radikal di era globalisasi. Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai organisasi transnasional Hizbut Tahrir tumbuh dan melintasi batas-batas negara termasuk tiba di Indonesia dan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui observasi online yang diurai dengan metode analisis isi. Temuan penelitian ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari pemain globalisasi. Ini dibuktikan dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam 50 negara dan lima benua di dunia yang didukung oleh media global milik mereka. Di Indonesia, meskipun sudah dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017 silam, aktivitas Hizbut Tahrir masih tetap menguat dan dipertahankan melalui instrumen-instrumen globalisasi seperti internet. Aktivitas gerilya maya kemudian dilakukan HTI sebagai upaya untuk tetap membumikan ide khilafah.

Katakunci: Islam politik, jaringan media, radikalisme Islam, revolusi politik

Pendahuluan

Globalisasi membawa pengaruh positif yang signifikan bagi kehidupan keberagaman masyarakat dunia (Behera, 2021), termasuk membawa pengaruh signifikan bagi umat Islam. Melalui globalisasi, prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi lebih cepat dan efisien (Yezli & Khan, 2020). Globalisasi memfasilitasi percepatan perubahan transportasi. Selain itu, globalisasi juga turut berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan umat Islam (Majeed, 2018). Kini setiap Muslim dapat menikmati sistem pendidikan yang lebih maju di berbagai negara Timur Tengah maupun Barat.

Selanjutnya, globalisasi juga turut melahirkan revolusi politik di berbagai negara Islam (Hachad, 2021). Hal ini dikarenakan sistem global menghendaki kehidupan yang lebih demokratis di setiap negara. Globalisasi merupakan media untuk terselenggaranya kebebasan berbicara, pemenuhan hak yang sama atas nama hak asasi manusia (HAM), dan kerjasama internasional secara terbuka. Revolusi yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah menjadi bukti bahwa sistem global membantu demokratisasi, sejak dari Tunisia, Mesir, Aljazair, Yordania, Yaman, Irak, Suriah, Iran, hingga Libya (García-Rivero, Clari, & Cubas, 2021). Peristiwa tersebut disebut sebagai *Arab Spring*. Revolusi politik yang terjadi di berbagai negara Arab diyakini turut dibangun oleh propaganda di media sosial (Tudoroiu, 2014) dan penguasaan media-media internet oleh para oposisi pemerintah (Young, 2021). Begitu pula, situasi konflik yang melanda wilayah Timur Tengah menyebabkan orang-orang berinisiatif melakukan migrasi ke wilayah Barat baik dengan tujuan positif maupun negatif (Rahman, 2014). Tujuan positif ditempuh dengan

tujuan mencari keamanan, memperoleh pendidikan, dan memperoleh pekerjaan (Borrego, Choe, Nguyen, & Knight, 2021). Sementara tujuan negatif biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh suaka atau propaganda di negara Barat (Hadzic, 2021).

Bersamaan dengan itu, fenomena terorisme global yang diusung oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) adalah bentuk dari dampak negatif sistem globalisasi dunia. Aktivitas ISIS diyakini sebagian besar terjadi di internet melalui propaganda terorisme dan penguatan jaringan di seluruh dunia (Sardarnia & Safizadeh, 2019). Selain ISIS dengan segala identitasnya yang ekstrem dan militeristik, Hizbut Tahrir yang berkonotasi radikal juga dikaitkan dengan globalisasi karena memiliki jaringan global. Baik ISIS maupun Hizbut Tahrir pada dasarnya melakukan hal yang sama yaitu menolak sistem globalisasi. Bagi Hizbut Tahrir, misalnya, globalisasi merupakan buah dari pemikiran Barat bersamaan dengan kapitalisme yang akan menyebabkan manusia menjadi sekuler. Untuk itu, Hizbut Tahrir menyerukan pentingnya untuk kembali pada pemahaman Islam yang menyeluruh (An-Nabhani, 2008). Karenanya, para pengamat menganggap bahwa radikalisme adalah gerakan yang reaksioner terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan politik Barat khususnya Amerika Serikat. Apalagi semenjak peristiwa 9/11 gerakan radikalisme kian nyata sebagai ancaman dan upaya penentangan globalisasi (Brookhouser, 2021).

Konsekuensi dari berkembang argumen penyederhanaan konflik ini ke dalam “Jihad vs McWorld” (Barber, 2010; Kornprobst & Paul, 2021), atau reaksi atas *coca-colanisasi* AS yang ditunjukkan dengan protes berlabel kesalehan agama (Suver, 2012). Lebih lagi, konsep ini berkembang pada fenomena anti-globalisasi dan ketegangan yang lebih besar antara “bangsa yang memiliki dan bangsa yang tidak memiliki” (Romano, Sutter, Liu, Yamagishi, & Balliet, 2021). Sementara itu, gerakan-gerakan radikalisme menginginkan sistem kepemimpinan tunggal melalui kekhilafahan Islam (*Khilafah Islamiyyah*) (Mubarok & Hamid, 2018). Sejatinya, visi ini bagian dari perwujudan globalisasi karena mencita-citakan keterhubungan dan penyempitan wilayah pada sistem globalisasi saat ini. Oleh karena itu, antara globalisasi dan gerakan radikalisme ada kaitan yang saling mempengaruhi. Ditambah penggunaan media-media globalisasi yang memperkuat keyakinan bahwa radikalisme adalah penafsir globalisasi (Yilmaz & Barton, 2021).

Gerakan radikalisme kian hari terlihat sebagai bagian dan pemain globalisasi. Karenanya, tulisan ini ingin menguji, apakah gerakan radikalisme merupakan bagian dan pemain globalisasi melalui ciri dan upayanya menggunakan perangkat globalisasi? Untuk membuktikannya, penulis berfokus pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang memiliki visi membuat komunitas global dan kehadirannya yang bersifat transnasional (Osman, 2010). Hal ini dirasa penting karena Hizbut Tahrir adalah gerakan anti-globalisasi yang menentang negara-bangsa (*nation-state*) bentukan negara-negara Barat pasca perjanjian Westphalia. Hizbut Tahrir juga penting diketahui peranannya dalam globalisasi karena paling getol menginformasikan urgensi kewarganegaraan global melalui *Daulah Khilafah*.

Radikalisme Islam Pemain Globalisasi

Agama telah terlibat dalam globalisasi dalam berbagai cara, misalnya sebagai sumber, dan sebagai bagian dari penafsir globalisasi (Yilmaz & Barton, 2021). Karenanya, gerakan radikalisme Islam juga telah menjadi sumber globalisasi dalam artian telah berperan membantu membangun hubungan global antar negara, mendorong dan menyetujui penyebaran hubungan global tersebut. Gerakan radikalisme Islam juga telah menyetujui komunikasi global sebagai ciri proses globalisasi. Memang benar jika diukur dari segi keuangan global, bisnis global, dan bisnis media, radikalisme Islam memiliki keuntungan yang relatif rendah dari ketiga proses tersebut. Namun, tidak dapat diabaikan dalam elemen pendukung globalisasi, radikalisme Islam memiliki pemahaman dan praktik yang mapan dalam mendukung berlangsungnya globalisasi (Kaya, 2021).

Selanjutnya, radikalisme Islam juga bagian dari komponen globalisasi. Ini dibuktikan dengan kegiatan transnasional mereka. Radikalisme Islam menyebarkan pemikiran hingga melampaui batas-batas negara melalui jejaring komunikasi dan informasi, melakukan migrasi internasional, dan merekrut anggota dengan cara mengontak secara personal (Rasiah, 2021). Faktor pendorong gerakan ini adalah kehadiran internet sebagai salah satu kekuatan mereka. Meskipun secara pemahaman agama sangat konservatif, namun secara kemampuan mengoperasikan internet mereka sangat modern (Sabic-El-Rayess, 2021). Maka, tiga prasyarat dalam globalisasi yaitu material, spasio-temporal, dan kognitif (Becken, Friedl, Stantic, Connolly, & Chen, 2021) bisa ditafsirkan dengan baik oleh gerakan-gerakan radikalisme Islam. Radikalisme Islam secara aktif terlibat dalam perdagangan global demi

keuntungan materi, kemudian seluruh aktivitas dan kejadian yang menimpa mereka turut berdampak secara menyeluruh pada masing-masing anggota di berbagai negara bagian. Ditambah, ide dan visinya secara kognitif tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan melintasi negara-bangsa.

Menanggapi masalah internasional yang menimpa negara-negara dunia atau disebut dengan masalah global (Albertoni & Wise, 2021), gerakan radikalisme Islam memiliki tanggapan sendiri (Kaya, 2021). Mereka beranggapan bahwa problem yang terjadi pada tatanan dunia karena disebabkan oleh kehidupan yang tidak menggunakan nilai dan hukum Islam sebagai landasannya. Karenanya, masalah global merupakan bagian dari perwujudan misi mereka dengan cara menghadirkan kepemimpinan global dalam bentuk *khilafah*. Meskipun, pandangan mereka terhadap globalisasi umumnya negatif dan kritis sebagai reaksi anti kapitalisme dan sekularisme.

Kasus Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (atau *Hizb—ut Tahrir* yang berarti Partai Pembebasan) atau HT adalah gerakan politik pan-Islam yang dideklarasikan untuk membentuk kembali kekhalifahan Islam melalui penerapan *syariah* (hukum Islam) yang kemudian akan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah Islam (*Khilafah Islamiyyah*) yang dibayangkan akan menyatukan umat Islam yang kemudian dijuluki *Ummah* (Commins, 1991). HT adalah partai transnasional yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah dan kemudian meluas ke seluruh dunia (Osman, 2018). Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 oleh seorang ulama Mesir bernama Taqiyyudin an-Nabhani. Ulama lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir ini pernah menjabat sebagai hakim (*qadli*) di Mandatory, Palestina. Sejak dibentuk, Hizbut Tahrir mengidentifikasi diri sebagai partai politik internasional (McNeil-Willson, 2021).

Hizbut Tahrir dengan “klaimnya” telah melakukan studi, penyelidikan, dan analisis tentang status Umat, khususnya kemerosotannya. Kemudian membandingkan dengan keadaan yang terjadi sepanjang hidup Nabi Muhammad, Khulafa ar-Rasyidin dan generasi tabiin (Osman, 2018). Hal inilah yang dijadikan landasan oleh HT ketika mengelak soal pertanyaan apa yang menjadi referensi dalam cita-cita mereka mendirikan negara Islam. Selain itu, HT juga menganggap telah merujuk pada sirah Nabi Muhammad Saw dan proses-proses dalam menjalankan dakwahnya dari awal hingga ia mendirikan Negara Islam di Madinah (Minardi, 2019).

Hizbut Tahrir telah memilih dan memutuskan konsep, pandangan, dan hukum tentang *fikrah* dan *thariqah* setelah melalui penelitian yang komprehensif. Menurut Hizbut Tahrir, semua pandangan dan peraturan harus berasal dari Islam. Tidak ada seorang pun yang tidak memeluk Islam. Bahkan apapun tidak boleh jika tidak berasal dari Islam. Hizbut Tahrir telah memilih dan memutuskan konsep, pandangan, dan aturan ini sejalan dengan isu yang dipertaruhkan dalam perjuangannya, yaitu pemulihan kehidupan Islam dan penyebaran Islam ke seluruh dunia melalui pembentukan khilafah dan pengangkatan seorang khalifah (An-Nabhani, 2008). Dengan demikian, Hizbut Tahrir memiliki dua konsep utama yang selalu menjadi landasan pergerakannya (An-Nabhani, 2008). *Pertama*, kebutuhan akan syariah atau hukum Islam untuk membangun masyarakat yang adil. Ini didasarkan pada ketidakadilan ekonomi terutama yang dialami oleh bangsa-bangsa Muslim di berbagai belahan dunia. Kuasa ekonomi Barat diyakini melemahkan perekonomian umat Islam sehingga selalu menjadi bayang-bayang negara Barat. Hizbut Tahrir percaya bahwa sistem kapitalisme hanya akan menciptakan gap yang besar yang mengantarkan negara-negara Barat terutama AS pada dominasi dan penjajahan atas ekonomi negara berkembang (Handoko, 2013). Oleh karenanya, Hizbut Tahrir beranggapan bahwa solusi tepat dengan menerapkan sistem hukum Islam untuk melawan sistem ekonomi kapitalis ala Barat.

Kedua, kebutuhan akan negara Islam sebagai satu-satunya entitas politik yang mampu menciptakan keadilan masyarakat (An-Nabhani, 2008). Hizbut Tahrir tidak mengenal pemisahan antara *din* (agama) dan *daulah* (negara) (Ahnaf, 2018). Karenanya, Hizbut Tahrir menyebut dirinya sebagai partai politik yang berideologikan Islam. Meskipun statusnya tidak terdaftar di negara manapun karena beroperasi di berbagai negara dan mendorong umat Islam untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan “partai politik palsu” layaknya partai politik ciptaan sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan Hizbut Tahrir adalah mengimplementasikan cara hidup Islami dan menghidupkan kembali umat Islam melalui cara berdirinya kembali negara Islam yang satu (Osman, 2018). Hizbut Tahrir kemudian menyebarkan ideologi politiknya melalui jaringan akar rumput di berbagai tingkatan masyarakat. Pada level terendah, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari lima orang yang disebut *halaqah* (lingkaran kecil), yang dipandu oleh seorang *musyrif* (pengawas). Dalam kegiatan *halaqah* ini, para anggota mulai mempelajari doktrin dan pola gerakan Hizbut Tahrir. Di level wilayah, mereka membentuk komite atau pimpinan daerah yang bertugas mengatur dan merekrut keanggotaan baru.

Fungsi pengurus wilayah amat penting untuk menjaga soliditas anggota sebagai modal penting penguat gerakan dan untuk menjaga dari adanya penyusup pihak keamanan. Di setiap wilayah ada seorang *mu'tamad* (ketua provinsi) yang diangkat oleh pengurus pusat internasional (*lajnah al-qiyadah*) (Karagiannis & McCauley, 2006).

Jaringan Global Hizbut Tahrir

Pencapaian Hizbut Tahrir ketika melampaui negara asalnya, Timur Tengah sudah membuktikan bahwa organisasi ini sebagai pemain globalisasi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa organisasi ini sebagai partai politik Islam global. Anggota HT terbukti tersebar di seluruh penjuru Asia, Afrika, Asia Tenggara, Amerika, Eropa, India, dan Australia (Freeman, Ellena, & Kator-Mubarez, 2021). Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa HT sudah tersebar di 50 negara di dunia. Di beberapa negara HT bahkan sudah menjadi organisasi yang berpengaruh di negaranya seperti Inggris dan Australia. Misalnya, di Inggris HT menjelma sebagai organisasi besar yang mempengaruhi akar rumput masyarakat Muslim serta memiliki basis gerakan yang besar (Ahmed & Stuart, 2010). Menurut laporan BBC Indonesia tahun 2017 menyebutkan bahwa HT Inggris memperoleh bantuan dari pemerintah. Meskipun, tujuan utama HT adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia, bukan fokus hanya pada satu negara saja karena bagi HT Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia agar cita-cita terbentuknya *Ummah* tercapai. Ini juga merupakan agenda wajib setiap pemimpin HT termasuk pemimpin HT saat ini, Ata Abu Rustha (Susilo, 2017).

Pertama-tama, jaringan global Hizbut Tahrir dapat ditelusuri di Timur Tengah. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena HT didirikan di Timur Tengah. Namun, gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan para anggotanya harus ditangkap dan dihukum oleh pemerintah. Diawali di Yordania dimana beberapa anggota HT ditangkap karena dituduh terlibat kudeta militer, meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti benar di pengadilan (Al-Islami, 2010). HT juga beroperasi di Suriah dimana para anggotanya ditangkap tahun 1999 oleh pihak keamanan. Ketika beroperasi di Irak, HT memperoleh tekanan serius dari presiden Saddam Husein dan anggotanya banyak di eksekusi tahun 1990 karena akan mendirikan negara Islam. Meskipun setelah Saddam Husein jatuh, HT mendapatkan angin segar karena bisa beroperasi kembali dengan membuka beberapa cabang di Irak tahun 2003 (Osman, 2018). Selanjutnya, HT juga beroperasi di Afrika seperti Mesir (Yilmaz

& Barton, 2021), Tunisia, Libya, Aljazair dan Sudan meskipun para anggotanya juga ditangkap oleh pemerintah. HT juga terasa di Turki meskipun aktivitas anggotanya dibatasi pemerintah (Damman, 2021). Selain itu, HT juga menyebar di Eropa khususnya berkembang di Eropa Barat. Perkembangan HT di Eropa dibawa oleh para imigran Muslim (Taji-Farouki, 2014). Antusiasme HT di Eropa cukup tinggi dikalangan Muslim, khususnya generasi muda yang menjadi korban diskriminasi sebagai umat dan etnis minoritas di Eropa. Di Swedia, HT memperoleh dukungan para imigran Muslim. Sementara di Jerman dan Denmark, HT mulai dilarang tahun 2003 karena dituduh menyebarkan propaganda anti-Semit dan Israel serta memiliki hubungan dengan kelompok teroris. Meskipun, pada akhirnya pemerintahan Jerman tidak berhasil memberikan bukti HT sebagai organisasi yang berhubungan dengan kelompok teroris dan menyebarkan propaganda anti-Semit (Sinclair, 2010).

Perkembangan HT di Inggris sangat dominan dan bergerak sangat aktif sehingga termasuk organisasi paling populer. HT sangat aktif di berbagai kampus di wilayah Birmingham, Sheffield, dan Bradford. Di Inggris, HT sangat aktif menampilkan diri sebagai organisasi yang moderat, ramah, dan cukup hati-hati dalam gerakannya untuk menghindari salah tafsir masyarakat atas gerakannya tersebut. Berkat upaya ini, HT Inggris memperoleh dukungan cukup baik dari pemerintah dan masyarakat lainnya (Swick, 2005). Selanjutnya, jaringan global Hizbut Tahrir juga tersebar di seluruh Asia meliputi Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tahun 1990-an HT masuk ke negara Asia Tengah seperti Kirgistan (Karagiannis, 2005), Kazakstan, Uzbekistan (Karagiannis, 2006), dan Tajikistan. Meskipun mereka harus memperoleh perlakuan represif dari negara-negara tersebut, namun mereka memperoleh popularitas yang tinggi dan akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat Asia Tengah (Karagiannis, 2009). Alhasil, di Asia Tengah keanggotaan mereka bisa ditaksir 30.000 sampai 100.000 orang. Sementara di Asia Tenggara, Hizbut Tahrir sangat berkembang di Indonesia. Tahun 1980-an HT masuk ke Indonesia dibawa oleh anggotanya yang berasal dari Yordania-Lebanon yaitu Abdurahman Al-Baghdadi. Meskipun bergerak secara sembunyi-sembunyi pada masa Orde Baru, namun pada masa Reformasi mereka mulai terbuka ke publik dengan menggelar unjuk rasa, protes, diskusi publik, seminar, dan aktivitas lainnya.

Pada 2007, Hizbut Tahrir berhasil menggelar Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri anggotanya dari seluruh penjuru dunia dengan 100.000 peserta. Konferensi ini diyakini sebagai konferensi terbesar di dunia yang pernah diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir (Alles, 2015). Terakhir, Hizbut Tahrir juga berkembang di Amerika Serikat. Kehadirannya di AS memang terkesan lambat karena terhambat oleh terjadinya 11/9. Namun, saat ini semakin berkembang dan menjadi organisasi vital para imigran Muslim (Karagiannis & McCauley, 2006). Saat ini para anggota Hizbut Tahrir tersebar di New York, Chicago, Milwaukee, Midwest, dan Orange Country. Perkembangan Hizbut Tahrir di AS juga dipengaruhi oleh peran mahasiswa internasional. Faktor lain yang menyebabkan Hizbut Tahrir berkembang di AS adalah kajian Islam meningkat signifikan di AS. Ini misalnya dibuktikan dengan pembukaan fakultas-fakultas Islam Timur Tengah yang banyak menarik minat mahasiswa internasional. Dengan demikian, Hizbut Tahrir kemudian memainkan peran penting dalam jaringan Hizbut Tahrir global dan akan diprediksi semakin berkembang pada dekade kedepannya (Karagiannis, 2009).

Media Global Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir mengampanyekan dan mempropagandakan ideologinya ke seluruh dunia melalui jaringan internet. Hal ini sekaligus merupakan ciri dari abad dua puluh satu dimana perkembangan media global dapat secara langsung dimanfaatkan masyarakat dunia (Lewis, 2003). Demikian pula, media global telah memainkan peran penting bagi komunitas Muslim global dalam pengembangan gagasannya, termasuk yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menganggap penting media global—internet sebagai ajang untuk mengatur kegiatan, merekrut anggota baru, dan menyebarkan pengaruh ideologinya ke seluruh dunia (Anderson, 2006). Karenanya, para penganut khilafah Islam berhasil mengadopsi dan mengadaptasi jaringan internet bagi kebutuhan dan kepentingan mereka. Seluruh anggota Hizbut Tahrir di dunia menggunakan media komunikasi global untuk melakukan pertukaran pikiran, memperkuat solidaritas sesama anggota, dan mengampanyekan persatuan umat Islam melalui anggota *umat sedunia*. Hal ini karena dunia maya sangat efektif dalam menyediakan sarana untuk memperkuat persatuan dan memelihara keanggotaan Hizbut Tahrir termasuk mengembangkan jaringan kepada non-anggotanya.

Internet menyebabkan para anggota Hizbut Tahrir berkeliling dunia untuk menciptakan komunitas ‘imajiner’ dari komunitas mereka yang bersifat global (Saunders, 2008). Akibatnya, Hizbut Tahrir menjadi salah satu kekuatan dominan dalam politik transnasional yang muncul dalam pengalaman dunia yang berkaitan dengan globalisasi. Pemikiran politik yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dihasilkan oleh kaum Muslim yang sebagian besar tinggal di ruang translokal yang merupakan produk dari proses migrasi dan globalisasi. Kelompok Muslim ini telah “membayangkan kembali Ummah” dengan menggunakan media dan komunikasi global yang berkontribusi pada pengembangan yang lebih luas di ruang publik umat Islam (Mandaville, 2003).

Penggunaan media dan komunikasi global ini digunakan oleh seluruh perwakilan wilayah dan negara Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Termasuk yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI). HTI sangat dominan menguasai opini publik di seluruh jagat media sosial Indonesia. Keanggotaan dan opini mereka juga sangat berkembang signifikan sehingga berkumpul dalam agenda-agenda yang besar. Sayangnya, terjadinya pembubaran Hizbut Tahrir di berbagai negara di dunia—termasuk di Indonesia kemudian membatasi ruang gerak aktivitas HTI dalam upaya rekrutmen dan propaganda (Setia, 2021). Diketahui pada Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi mencabut SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengisyaratkan pembubaran organisasi tersebut karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila (Setyawati, 2017).

Hizbut Tahrir Indonesia: Gerilya Maya Pasca-Pembubaran

Hizbut Tahrir diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1982 oleh Abdul Rahman al-Baghdadi, pimpinan HT Australia. Abdul Rahman al-Baghdadi direlokasi ke Bogor atas permintaan KH Abdullah bin Nuh sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor (Alles, 2015). Berkat peran Al-Baghdadi, Hizbut Tahrir mulai berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, gerakan ini semakin populer di kampus-kampus di Indonesia. Akibatnya, anggota HTI mulai diisi oleh kalangan intelektual, termasuk akademisi dan mahasiswa. Meskipun demikian, kehadirannya pada masa orde baru hanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi karena represi rezim yang otoriter (Arifan, 2014). Barulah semenjak orde reformasi, Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan keuntungan akibat terbuka keran kehidupan demokrasi (Setia, 2020). Namun itu pun tidak lama.

Pasca dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan transformasi gerakan pada aktivitas yang berbasis di internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terendus oleh pihak keamanan dan pemerintah. Namun demikian, ini bukanlah persoalan yang sulit bagi HTI karena sebagai pemain globalisasi, Hizbut Tahrir telah lebih dulu melakukan aktivitas gerakan di media internet pada media global milik mereka (Setia, 2020).

Internet memberikan peluang terbuka bagi semua kelompok keagamaan Islam dalam meluaskan pengaruhnya. Internet telah mengingatkan 'dunia Muslim yang lebih luas' kepada kelompok-kelompok minoritas beserta ideologinya dengan menghasilkan minat dan afiliasi yang telah berkembang dengan sangat cepat melalui media digital (Gary R Bunt, 2009). Pendekatan yang digunakan dalam memanfaatkan internet adalah dengan mengedepankan pengetahuan dan ekspresi Islam, serta metode komunikasi yang menyesuaikan pasar agar memberikan pengaruh wacana dan pemahaman personal baik dalam konteks lokal, regional, maupun global. Melalui konsep ini, HTI memanfaatkan internet sebagai kelompok minoritas untuk memperkenalkan ideologinya seluas-luasnya. HTI juga mengekspresikan pengetahuan Islam (versi HTI) yang kemudian memberikan wacana dengan tujuan agar mempengaruhi masyarakat luas. Konsep ini merupakan bagian dari *cyber Islamic environment* (CIE) atau lingkungan siber Islam dimana Islam menemukan lingkungan dan ruang baru di internet yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Melalui internet, pesan-pesan Islam dapat tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Melalui internet pula, Islam dapat menyebar luas dan dikenali di berbagai belahan dunia. Namun, melalui internet juga, pesan-pesan Islam yang dibuat tidak ramah oleh oknum-oknum tertentu—seperti kaum radikal, dapat tersebar luas dan merusak citra Islam itu sendiri (G. R. Bunt, 2003).

Setelah dibubarkan pemerintah pada 2017 silam, transformasi identitas dilakukan oleh HTI khususnya apa yang terlihat di media sosial dan internet. Atau secara tidak langsung pembubaran terhadap HTI menyebabkan ormas tersebut semakin tersudut dan tidak memiliki tempat lagi di masyarakat (langsung). Perubahan "dakwah" pun dilakukan secara diam-diam melalui media sosial. Dakwah mereka bahkan mengadopsi sistem politik *post-truth* (pasca-fakta) (Setia, 2020). Politik pasca-fakta merupakan suatu aktivitas politik yang menciptakan kebenaran sendiri tetapi jauh dari fakta dan justru memperkenalkan dugaan-dugaan agar mempengaruhi opini publik sehingga

dipercaya oleh masyarakat luas (Tobias, 2019). Penelitian Setia (2021), menyebutkan bahwa anggota-anggota HTI tidak segan memfabrikasi berita yang dibungkus kebenaran alternatif versi Hizbut Tahrir. Misalnya, penyelewengan fakta hasil laporan *National Intelligence Council* AS tentang ramalan dominasi kekuatan politik dunia tahun 2020. Laporan tersebut menyebut bahwa akan ada kekuatan politik kuat dari negara-negara Islam di tahun tersebut terutama kerjasama antar negara-negara Petrodollar. Sayangnya, beberapa bukti *screenshot* anggota HTI di media sosial justru menyebut bahwa dominasi negara Petrodollar itu dimaknai sebagai bangkit dan berdirinya kekhalifahan Islam (National Intelligence Council, 2004).

Gambar 1. Bukti *screenshot* tiruan manipulasi "Khilafah akan tegak tahun 2020!" (Sumber: Instagram.com).

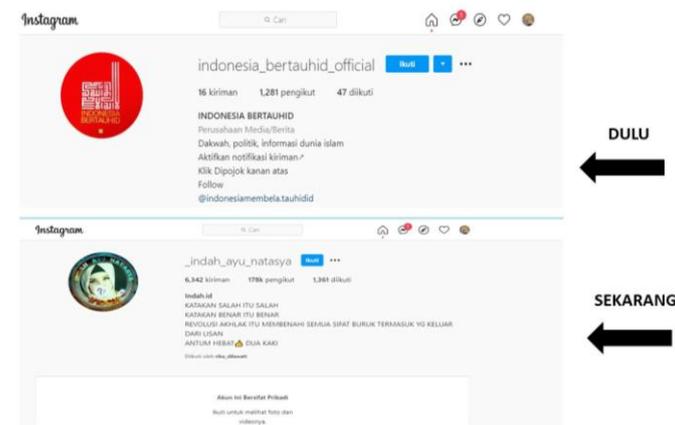


Beberapa agenda diskusi yang sediakala dilaksanakan di kampus dan masjid-masjid perkotaan, kini beralih ke siaran langsung YouTube atau siaran langsung Instagram. Misalnya agenda Muhasabah Akhir Tahun Hizbut Tahrir Indonesia yang sebelum dibubarkan pemerintah selalu digelar di gedung atau aula besar atau bahkan di stadion seperti Konferensi Khilafah Internasional Tahun 2007, kini beralih ke media sosial dan media konferensi online (*Zoom Meeting*). Acara besar-besar yang dilaksanakan langsung bukan tidak ingin digelar kembali oleh HTI, namun pasca dibubarkan pemerintah izin penyelenggaraan tentu sangat sulit diperoleh. Agenda-agenda lainnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) yang biasanya dilaksanakan di kampus-kampus kini harus beralih ke media digital. Apalagi statuta resmi mereka dicabut oleh rektorat kampus. Misalnya terjadi pada LDK Harmoni, Amal, dan Titian Ilmu (HATI) ITB yang dibubarkan rektor ITB pada 2018 silam karena berafiliasi dengan HTI (Prasetyanto, 2018). Namun, belakangan LDK tersebut tetap bergerak dengan merekrut anggota dan melaksanakan kampanye HTI namun dengan cara yang sembunyi-sembunyi dan dilaksanakan diluar

kampus. Agenda mereka juga kini melebur dengan agenda BKLDK Jawa Barat selaku koordinator LDK kampus di wilayah Jawa Barat. Agendanya juga lebih berfokus pada kajian-kajian secara online dan penyebaran konten HTI melalui meme, poster, dan video.

Gerilya lain yang dilaksanakan di media maya oleh HTI dilakukan dengan mengubah identitas akun mereka di media sosial. Ini terlihat pada akun Instagram Indonesia Bertauhid (@indonesia_bertauhid_official) yang merupakan akun utama kampanye Hizbut Tahrir Indonesia yang kini beralih nama menjadi nama akun pribadi indah.id (@_indah_ayu_natasya) (Lihat gambar 2). Perubahan akun ini disinyalir bukan karena akun diretas, melainkan memang murni disengaja oleh pemilik akun karena konsistensi konten yang diunggah tetap bernada pesan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Perubahan identitas nama ini juga ditambah dengan visibilitas akun menjadi bersifat pribadi yang semula bersifat publik. Alasan yang senada dengan perubahan nama dan visibilitas akun ini adalah untuk menjaga keamanan akun dari pihak-pihak yang ingin meretas akun tersebut.

Gambar 2. Perubahan akun Instagram Indonesia Bertauhid (sumber: Instagram.com).



HTI juga melakukan gerilya pasca-pembubaran melalui publikasi film. Film yang diproduksi oleh HTI yang menuai perhatian publik berjudul “Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN)”. Film ini memilih tidak menggunakan platform media sosial Instagram, YouTube, atau Facebook karena ada ancaman akan diblokir tayangnya film tersebut. Makanya, film ini disebarluaskan dan ditonton melalui aplikasi pemutar film tertentu dengan bermodal tiket khusus. Meskipun demikian, propaganda untuk menonton film disebar di semua media sosial HTI. Film JKDN ini berisi tentang jejak-jejak sejarah hubungan antara kekhilafahan Islam dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sontak jejak-jejak khilafah di Indonesia yang dimaksud HTI nyatanya dibantah

oleh para sejarawan Indonesia seperti Alwi Alatas dan sejarawan moderat lainnya. Alatas misalnya, dalam satu kesempatan wawancara dengan media menyebut bahwa apa yang digambarkan dalam film JKDN bukanlah fakta yang sesungguhnya. Ada beberapa fakta yang sengaja dibelokkan oleh HTI dengan menggunakan metode ilmiah. Karenanya yang terlihat justru lebih pada agenda penyebarluasan paham khilafah bukan fokus pada makna film sendiri (Ahmad, 2020). Beberapa pihak juga menilai bahwa sejarawan yang dijadikan rujukan utama film dipertanyakan objektivitasnya karena merupakan simpatisan HTI. Misalnya, Nicko Pandwa (kader HTI), Septian AW (kader HTI), Moeflich Hasbullah (simpatisan HTI), dan Hafidz Abdurahman (ketua DPP HTI).

Komentar pedas juga disampaikan Prof. Peter Carey sebelum penayangan film tersebut karena menurutnya film ini sengaja di desain oleh HTI untuk menyebarkan propaganda khilafah di Indonesia. Carey juga membeberkan bahwa ia pernah dicatut namanya oleh HTI secara sepihak (Ahmad, 2020). Memang, sebelum dihapus oleh HTI, cuplikan (*trailer*) film JKDN mencantumkan nama Carey sebagai salah satu sejarawan rujukan. Meski sempat menuai penolakan besar-besaran dari netizen tanah air, film ini sempat menjadi topik utama (*trending topic*) jagat maya Twitter pada rentang waktu 2020 silam.

Gambar 3. Kampanye pemutaran film JKDN (sumber: Instagram.com/ismail_yusanto)



Usaha lain yang dilakukan HTI adalah optimalisasi media sosial YouTube dengan beberapa kanal resmi HTI. Diketahui HTI memiliki beberapa kanal sebagai media informasi utama yakni Media Ummat, Muslimah Media Center, BKLDK Channel, dan Khilafah Channel. Meskipun beberapa kanal YouTube ini sama-sama berafiliasi kepada HTI, namun semuanya dikelola oleh beberapa bidang yang berbeda. Kanal Muslimah Media Center dikelola oleh organisasi muslimah HTI, kanal BKLDK dikelola oleh badan koordinasi dakwah kampus, sementara kanal Media Ummat merupakan kanal khusus media dan tabloid utama HTI dengan nama yang sama, Media Ummat. Sedangkan kanal resmi yang dikelola oleh pimpinan pusat HTI adalah Khilafah Channel. Konten-konten Khilafah Channel adalah kajian-kajian keislaman sekaligus penyebaran opini yang disajikan oleh pimpinan dan cendekiawan HTI semisal Ismail Yusanto, Rakhmat Labib, Yasin Mutohir, Hafidz Abdurahman, Yuana Tresna dan lain-lain. Pelanggan (*subscribers*) kanal Khilafah Channel sudah menyentuh angka 82,2 ribu dengan jumlah 320 video.

Konsistensi dan jumlah pengunjung kanal tersebut layak disebut salah satu kanal YouTube ormas terbanyak setelah NU Channel dan Muhammadiyah TV. Sama seperti kanal ormas keagamaan lainnya, kanal Khilafah Channel ini turut menyajikan berbagai konten yang inovatif yang didukung kualitas video dan audio yang mendukung. Tidak ketinggalan kanal ini juga memberikan pengalaman langsung melalui kajian siaran langsung (*live streaming*) kepada para pelanggan dan para pengunjung. Dilihat dari pengaruhnya, kanal ini juga memiliki video yang telah menyentuh jumlah penonton mencapai jutaan tontonan, ratusan ribu, hingga ribuan penonton. Misalnya, video yang berjudul “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia” yang tayang pada Maret 2019 silam telah ditonton oleh 1,1 juta penonton, 453 ribu suka (*likes*), 25 ribu tidak suka (*unlikes*), dan 1,1 ribu komentar. Maka demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah HTI ke media sosial YouTube cukup efektif bagi penyebaran opini kepada khalayak luas.

Gambar 4. Tampilan depan kanal Youtube Khilafah Channel (sumber: Youtube.com/khilafahchannel)



Gerilya HTI juga dilaksanakan di media sosial Twitter. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan beberapa tagar (tanda pagar) atau *hashtag* (#) yang sudah di desain HTI dan menjadi perbincangan netizen di Twitter. Suatu tagar yang menjadi perbincangan utama (*trending topic*) di Twitter biasanya disebarakan melalui peran para anggota Hizbut Tahrir Indonesia sesuai dengan perintah dan petunjuk para *musyrif*, penanggung jawab (PJ) wilayah, dan pimpinan pusat. Suatu tagar biasanya mewakili satu pesan kampanye tertentu yang sudah direncanakan matang-matang oleh HTI. Biasanya suatu pesan kampanye berisi tentang pandangan dan solusi alternatif HTI mengenai satu fenomena atau peristiwa yang sedang aktual baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu isu yang sempat menjadi trending topik Twitter pada tahun 2019 silam adalah kasus kekerasan yang menimpa kaum Muslim di India (BBC, 2019) yang dimanfaatkan HTI dengan mengampanyekan #WeNeedKhilafah.

Tagar tersebut berisi kampanye HTI tentang pentingnya khilafah (kepemimpinan tunggal Islam) sebagai solusi untuk melindungi kaum Muslim di seluruh dunia. Selanjutnya, tagar yang menjadi *trending topic* dan juga didesain HTI pada tahun 2019 silam adalah #Remember3rdMarch1924 yang berisi tentang kampanye ‘mengingat kembali’ peristiwa runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal Attaturk tahun 1924. Peristiwa ini dianggap sebagai akhir dari kekhilafahan Islam menurut keyakinan HTI. Kedua tagar ini masing-masing dicuitkan oleh lebih dari 300 ribu orang di Twitter. Karenanya, gerilya HTI di Twitter ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mempengaruhi opini publik untuk membicarakan kedua topik tersebut berulang-ulang dalam periode tertentu.

Gambar 5. Trendingnya suatu topik yang digalakkan HTI (Sumber: Twitter.com).



Gerilya HTI di media sosial juga diperluas dalam bentuk perluasan opini secara langsung melalui bahan bacaan secara ilmiah. Beberapa artikel dan buku-buku karangan pemimpin, cendekiawan, pengurus, dan simpatisan HTI kerap tersebar luas di berbagai platform media sosial. Salah satu tulisan yang sempat menyita perhatian netizen adalah tulisan cendekiawan HTI, Arief B. Iskandar yang berjudul "Pseudo Ideologi Pancasila—Dalam Cengkraman Liberalisme dan Ancaman Komunisme". Buku yang berjumlah 150 halaman ini khusus disajikan sebagai bahan kajian yang hanya bisa dibaca secara online (atau berbentuk *ebook*). Penulisan buku ini juga merupakan upaya untuk "memanaskan situasi" peringatan hari lahirnya Pancasila. Ini sekaligus menunjukkan sikap HTI terhadap ideologi yang menurutnya sah dan harusnya diterapkan adalah Islam beserta seluruh ajarannya bukan Pancasila yang merupakan hasil pikiran manusia. Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa penulisan buku tentang Pancasila adalah upaya HTI untuk menciptakan diskursus ideologi negara terus memanas.

Menurut Sabari (2017), menyebut bahwa HTI merupakan ormas yang paling aktual dalam mewacanakan tema diskursus publik karena mereka selalu berusaha menjawab setiap persoalan yang ada dengan fakta alternatif kembali pada kekhilafahan Islam. Ini juga dibuktikan dengan reaktifnya para cendekiawan mereka dalam setiap persoalan. Misalnya, isu mengenai meningkatnya radikalisme di Indonesia yang dijawab oleh salah satu cendekiawan HTI, Hafidz Abdurahman. Dalam tulisannya, Abdurahman menyimpulkan bahwa proyek radikalisme adalah proyek 'pertempean' umat Islam. Ini dimaksudkan sebagai kritik Abdurahman pada pemerintahan Joko Widodo yang malah lebih senang mengurus urusan 'sepele' bangsa ini dan melupakan urusan penting seperti ketidakadilan dan kemiskinan yang menjadi persoalan pokok. Fakta lainnya, berbagai tulisan yang tersebar luas di media sosial biasanya disampaikan sebagai pesan berantai atau dibagikan dalam bentuk tautan untuk mengakses tulisan-tulisan HTI.

Gerilya HTI di media maya yang berbentuk tulisan juga dikemas dalam bentuk buletin online. Diketahui HTI memiliki beberapa buletin yang selalu disebarluaskan oleh para anggota dan simpatisannya di media sosial di beberapa level usia. Pada usia remaja mereka memiliki buletin bernama *Teman Surga* (TS). Buletin ini terbit setiap seminggu sekali yang fokus tulisannya diarahkan pada usia remaja. Tema-tema tulisan yang diangkat juga berkaitan dengan usia remaja seperti kampanye berbelanja dalam Islam, berkomunikasi dengan lawan jenis menurut Islam, dan belajar perspektif Islam. Tidak lupa,

buletin ini juga selalu dibalut oleh pesan-pesan khas HTI seperti *back to Islam*, *road to Islam Kaffah*, dan *smart with Islam*. Salah satu tulisan dalam buletin online *Teman Surga* edisi 24 Desember 2019 berjudul *Be Smart Shopping, Please!* Tulisan ini menyimpulkan bahwa Islam amat teratur dalam membelanjakan uang agar tidak terbawa pada perilaku boros dan rakus. Namun, sayangnya di dua paragraf terakhir tulisan ini diakhiri dengan keharusan bagi umat Muslim untuk menegakkan sistem Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat Islam. Hal ini karena saat ini perilaku boros dalam berbelanja disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menyerang kaum Muslim (Lihat: Buletin *Teman Surga* edisi 24 Desember 2019).

Bahasa dan gaya tulisannya juga disesuaikan dengan usia remaja dan pelajar. Tak heran buletin ini cukup digandrungi para pelajar yang tertarik belajar Islam lebih mendalam. Mereka juga kadang tidak tahu bahwa buletin ini milik dan diterbitkan oleh HTI. Lebih jauh, buletin untuk bacaan usia dewasa juga dimiliki dan disebarluaskan HTI dengan nama *Kaffah*. Sebelum dibubarkan, HTI masih memiliki kebebasan untuk menyebarkan buletin ini ke setiap masjid-masjid di kota besar menjelang pelaksanaan shalat jum'at. Nama buletin juga masih *Al-Islam*. Sementara pasca dibubarkan, HTI sangat kesulitan dalam menyebarkan buletinnya ke setiap masjid. Makanya, untuk menyiasatinya mereka mengganti nama buletin menjadi *Kaffah*. Hal ini selain sebagai alasan ideologis yakni mengadopsi cita-cita mereka seputar penegakkan Islam Kaffah, juga untuk menyamarkan identitas buletin mereka di mata masyarakat (HTI, 2019). Dalam satu edisi tulisan, buletin *Kaffah* pernah memuat artikel dengan judul, "Urgensi Penegakkan Islam Kaffah". Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman kaffah yang selama ini ditafsirkan oleh kalangan Muslim moderat keliru, dimana hanya menekankan kepada pelaksanaan ajaran Islam tanpa menemui hambatan seperti di Indonesia. Nyatanya, penerapan ajaran Islam tersebut adalah keliru dan tetap tidak akan bisa dilaksanakan selama tidak ada kepemimpinan Islam di seluruh dunia sebagai pelindung dan pelaksana ajaran Islam kaffah ini (Buletin *Kaffah* edisi 2 Januari 2019). Sama halnya dengan buletin *Teman Surga*, buletin *Kaffah* juga terbit setiap seminggu sekali. Kedua buletin ini amat masif disebar di berbagai media sosial, khususnya media sosial yang memfasilitasi membaca langsung seperti WhatsApp dan Telegram. Biasanya para anggota HTI dan simpatisan menjadikannya sebagai pesan berantai dari satu kontak ke kontak lainnya, dan kemudian dari satu grup ke grup lainnya.

Simpulan

Argumen yang menyebutkan bahwa gerakan radikalisme Islam anti terhadap globalisasi nampaknya masih terburu-buru. Gerakan radikalisme Hizbut Tahrir justru berperan sebagai pemain globalisasi dengan membuat visi mewujudkan kewarganegaraan global atau *Ummah*. Selanjutnya, Hizbut Tahrir juga mengadopsi metode globalisasi dengan melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia bercirikan sebagai organisasi transnasional. Hizbut Tahrir telah beroperasi di seluruh dunia dan memiliki kehadiran yang kuat di Eropa, Timur Tengah, Amerika, Asia, dan Australia. Penggunaan luas media global, khususnya internet, menjadi bukti lain keterlibatan gerakan ini dalam percaturan global. Terlebih lagi, ambisi Hizbut Tahrir untuk mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah*, sebuah kewarganegaraan global bagi seluruh umat Islam di dunia, dapat dipahami sebagai ambisinya untuk memposisikan dirinya sebagai pemain global dan untuk menafsirkan globalisasi untuk kebutuhan dan kepentingannya. Untuk kasus Indonesia, meskipun sudah dilarang secara resmi oleh pemerintah Indonesia, peran Hizbut Tahrir Indonesia tetap signifikan melalui perlawanan opini menggunakan media sosial.

Mengamati beberapa platform media sosial di Indonesia dipenuhi oleh diskursus mereka. Melalui gerilya di dunia maya, HTI menganggap ia akan diuntungkan oleh kondisi dimana masyarakat akan berempati kepadanya karena mengalami perlakuan yang merugikan (*play victim*) yang dilakukan oleh pemerintah. Inilah yang terus diperjuangkan HTI meskipun harus mengulang aktivitas gerakannya semasa pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir telah memperlihatkan bahwa radikalisme Islam merupakan bagian dan kekuatan globalisasi yang menantang eksistensi negara-bangsa (*nation-state*) dengan bercita-cita untuk kewarganegaraan global. Terlepas dari itu utopis atau tidak, Hizbut Tahrir merupakan fenomena globalisasi yang merupakan reinterpretasi agama-agama dunia lama, yang ditandai dengan penolakannya terhadap validitas negara-bangsa dan menguatkan visi komunitas global yang dibayangkan pengikutnya dengan aturan universalistik dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Referensi

- Ahmad, A. (2020). Kritik Film Jejak Khilafah di Nusantara: Propaganda atau Sejarah? *Sangkhalifah.Co*.
- Ahmed, H., & Stuart, H. (2010). Profile: Hizb ut-Tahrir in the UK. *Current Trends in Islamist Ideology*, 10, 143–172.
- Ahnaf, M. I. (2018). Hizb al-Tahrir: Its Ideology and Theory for Collective Radicalization. In *Expressions of Radicalization* (pp. 295–320). Springer.
- Al-Islami, H. al-T. (2010). *A communiqué from Hizb ut-Tahrir to the Jordanian Government*.
- Albertoni, N., & Wise, C. (2021). International trade norms in the age of Covid-19 nationalism on the rise? *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(1), 41–66.
- Alles, D. (2015). Transnational Islamic actors and Indonesia's foreign policy. In *International Journal of Accounting Information Systems*. Routledge: Transcending the state.
- An-Nabhani, T. (2008). Mafahim Hizbut Tahrir. terj. Abdullah, Cet. IV. Jakarta: *Hizbut Tahrir Indonesia*.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso books.
- Arifan, F. A. (2014). Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 94–102.
- Barber, B. R. (2010). *Jihad vs McWorld*. Random House.
- BBC. (2019). Muslim di India: Insiden “dipaksa makan daging babi” dan kekerasan membuat korban tak punya alasan hidup. *BBC Indonesia*.
- Becken, S., Friedl, H., Stantic, B., Connolly, R. M., & Chen, J. (2021). Climate crisis and flying: social media analysis traces the rise of “flightshame.” *Journal of Sustainable Tourism*, 29(9), 1450–1469.
- Behera, N. C. (2021). Globalization, deglobalization and knowledge production. *International Affairs*, 97(5), 1579–1597.
- Borrego, M., Choe, N. H., Nguyen, K., & Knight, D. B. (2021). STEM doctoral student agency regarding funding. *Studies in Higher Education*, 46(4), 737–749.
- Brookhouser, J. J. (2021). Through the Extremist Lens: Uncovering the Correlation Between Domestic Right-Wing Extremist Ideology and Violence in the United States from 2000 to 2020. *Global Security & Intelligence Studies*, 6(1), 25507.
- Bunt, G. R. (2003). *Islam in the digital age: E-jihad, online fatwas and cyber*

Islamic environments.

- Bunt, Gary R. (2009). *iMuslims: Rewiring the house of Islam*. Univ of North Carolina Press.
- Commins, D. (1991). TAQ AL-D N AL-NABHĀN AND THE ISLAMIC LIBERATION PARTY. *The Muslim World*, 81(3-4), 194–211.
- Damman, M. R. (2021). The Islamic Liberation Party Is A Study Of Its Theoretical Foundations And Its Impact On The Political Arena In Iraq. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 1229–1235.
- Freeman, M., Ellena, K., & Kator–Mubarez, A. (2021). *The Global Spread of Islamism and the Consequences for Terrorism*. U of Nebraska Press.
- García–Rivero, C., Clari, E., & Cubas, J. M. (2021). Islamist Political Parties and Parliamentary Representation in the Middle East and North Africa. *Comparative Sociology*, 20(4), 441–472.
- Hachad, N. (2021). Lalla Essaydi’s Bullets and Bullets Revisited: Aesthetic and Epistemic Violence in a Globalized Art World. *Journal of Middle East Women’s Studies*, 17(1), 1–21.
- Hadzic, F. (2021). The migrations and the mass media; conceptualization of the freedom from fear and want. *International Journal of Media Culture and Literature*, 7(1), 61–78.
- Handoko, D. O. (2013). *ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET–ASET PUBLIK*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- HTI, H. T. I. (2019). Buletin Kaffah edisi 2 Januari. *Kaffah*.
- Karagiannis, E. (2005). Political Islam and social movement theory: The case of Hizb ut–Tahrir in Kyrgyzstan. *Religion, State and Society*, 33(2), 137–150.
- Karagiannis, E. (2006). Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut–Tahrir al–Islami. *Europe–Asia Studies*, 58(2), 261–280.
- Karagiannis, E. (2009). *Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut–Tahrir*. Routledge.
- Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut–Tahrir al–Islami: Evaluating the threat posed by a radical Islamic group that remains nonviolent. *Terrorism and Political Violence*, 18(2), 315–334.
- Kaya, A. (2021). Islamist and Nativist Reactionary Radicalisation in Europe. *Politics and Governance*, 9(3), 204–214.
- Kornprobst, M., & Paul, T. V. (2021). Globalization, deglobalization and the liberal international order. *International Affairs*, 97(5), 1305–1316.

- Lewis, D. (2003). *Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir*.
- Majeed, M. T. (2018). Quality of life and globalization: Evidence from Islamic countries. *Applied Research in Quality of Life*, 13(3), 709–725.
- Mandaville, P. G. (2003). *Transnational Muslim politics: Reimagining the umma*. Routledge.
- McNeil-Willson, R. (2021). Counter-terrorism and the repression of Islamic activism: Hizb ut-Tahrir in Britain and Denmark. *Journal of Contemporary European Studies*, 1–16.
- Minardi, A. (2019). The New Movement of Islamic Revivalist Accommodationist and Confrontationist (Prosperous Justice Party and Hizb ut-Tahrir). *Journal of Indonesian Islam*, 12(2), 247–264.
- Mubarok, M. Z., & Hamid, A. F. A. (2018). The rise of radicalism and terrorism in Indonesia and Malaysia. *Review of Islam in Southeast Asia*, 1(1), 29–43.
- National Intelligence Council. (2004). *Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project, Based on Consultations with Nongovernmental Experts Around the World*. US: US Government Printing Office.
- Osman, M. N. M. (2010). The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia. *South East Asia Research*, 18(4), 735–755.
- Osman, M. N. M. (2018). *Hizbut Tahrir Indonesia and political Islam: Identity, ideology and religio-political mobilization*. Routledge.
- Prasetyanto, A. (2018). Ketika ITB Bersihkan HTI dari Kampus. *Kumparan.Com*.
- Rahman, M. T. (2014). Islam dan Demokrasi dalam Wacana Kontemporer. *Risalah*, 51(11), 72–75.
- Rasiah, H. (2021). An Imagined Diaspora: The making of Shi'i Muslim ethnicity in Sri Lanka. *The Journal of Indian Ocean World Studies*, 4(2), 144–164.
- Romano, A., Sutter, M., Liu, J. H., Yamagishi, T., & Balliet, D. (2021). National parochialism is ubiquitous across 42 nations around the world. *Nature Communications*, 12(1), 1–8.
- Sabari, S. (2017). Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 73–88.
- Sabic-El-Rayess, A. (2021). How do people radicalize? *International Journal of Educational Development*, 87, 102499.
- Sardarnia, K., & Safizadeh, R. (2019). The internet and its potentials for networking and identity seeking: A study on ISIS. *Terrorism and Political Violence*, 31(6), 1266–1283.
- Saunders, R. A. (2008). The ummah as nation: a reappraisal in the wake of the

- 'Cartoons Affair.' *Nations and Nationalism*, 14(2), 303–321.
- Setia, P. (2020). *Islamic-buzzer dan hoaks: Propaganda khilafah oleh eks HTI Kota Bandung di Jawa Barat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45.
- Setyawan, F. A. (2017). Pemerintah Resmi Cabut SK Badan Hukum HTI. *CNN Indonesia*.
- Sinclair, K. (2010). *The caliphate as homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain*. Citeseer.
- Susilo, M. (2017). Mengapa organisasi Hizbut Tahrir tidak dilarang di Inggris? *BBC Indonesia*.
- Suver, S. A. (2012). *Dream of Tangier: Revolution and Identity in Post-War Expatriate Literature*.
- Swick, S. (2005). From London to Andijan. The Rising Global Influence of Hizb-ut-Tahrir Among Muslim Youth. *Minaret of Freedom Institute*.
- Taji-Farouki, S. (2014). Hizb ut-Tahrir. *Islamic Movements in Europe: Public Religion and Islamophobia in the Modern World*, 44–50.
- Tobias, S. (2019). Hoaks Pilpres Dan Kebenaran Menurut Aristoteles. *PinterPolitik.Com*.
- Yezli, S., & Khan, A. (2020). COVID-19 social distancing in the Kingdom of Saudi Arabia: Bold measures in the face of political, economic, social and religious challenges. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 101692.
- Yilmaz, I., & Barton, G. (2021). Political Mobilisation of Religious, Chauvinist, and Technocratic Populists in Indonesia and Their Activities in Cyberspace. *Religions*, 12(10), 822.
- Young, S. (2021). Internet, Facebook, competing political narratives, and political control in Cambodia. *Media Asia*, 48(1), 67–76.

This page intentionally left blank